

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini maka lahirlah lembaga keuangan syariah (LKS), antara lain adalah BMT. BMT merupakan kependekan dari *Baitul Māl Wat Tamwīl*. Secara bahasa *Baitul Māl* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul Māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam, dimana *Baitul Māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹

BMT yang dalam konteks ekonomi sebagai sarana peredaran uang selalu berupaya agar dana yang terkumpul dapat tersalurkan dengan baik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab disatu sisi manusia memiliki kelebihan dana sehingga dia menyimpan uang tersebut pada LKS supaya aman, disisi lain ada yang tidak memiliki dana tetapi mempunyai tekad kuat dan kemampuan untuk berusaha demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang memunculkan akad kerja-sama *mudārabah* sehingga dana dapat tersalurkan dan dapat mewujudkan kesejahteraan serta untuk memperoleh keberkahan.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitulmaal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.120

Al- *Muḍārabah* adalah akad kerja-sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyerahkan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*muḍārib*), sebagaimana nantinya akan melakukan kegiatan usaha bersama dan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati².

Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang bersifat amanah. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan antara kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak harus menjaga kepentingan bersama artinya tidak diperkenankan *ṣāhibul māl* memintakan jaminan kepada *muḍārib* karena *muḍārib* hanyalah sebagai pengelola modal dalam fikih pun tidak tercantum bahwa jaminan sebagai salah satu syarat dari perjanjian tersebut.

Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan sertakesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Satu hal yang harus diperhatikan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Syariah adalah terdapat pada UU Perbankan No. 10 dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum penjelasan no. 23 yaitu : “Agunan adalah jaminan tambahan

² H. Viethzal Rivai, Andria Permata Viethzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.123

yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Dalam hal ini menjelaskan bahwa jaminan harus disertakan dalam bentuk agunan.

Sangat jelas terlihat bahwa literature fikih dan dalam fatwa MUI, jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak diperlukan. Sedangkan ketentuan undang-undang perbankan yang telah tersebut di atas, jaminan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh bank / lembaga keuangan syariah sendiri. Padahal menurut pengertian *muḍārabah* di atas dapat tergambar bahwa *muḍārib* adalah pihak yang tidak mempunyai uang/ modal sehingga *muḍārib* memohon kepada (*ṣāhibul māl*) untuk memberikan modal dengan catatan pengembalian modal dan pembagian keuntungannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan *muḍārib* tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan.

Kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk melihat apakah lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya di KJKS BMT Surya Madani telah menerapkan prinsip syariah secara murni dalam praktik *muamalah* di lapangan, terutama terhadap jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah*. Sebab menurut penulis, akad *muḍārabah* merupakan akad yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia jika sesuai prinsip syariah mengingat Indonesia masih membutuhkan dana dalam mengembangkan perekonomian yang terbentur pada masalah modal (dana). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Fungsi**

Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KJKS BMT Surya Madani Boyolali)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi jaminan yang diterapkan dalam pembiayaan *muḍārabah* pada KJKS BMT Surya Madani?
2. Apa pandangan Hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* pada KJKS BMT Surya Madani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai fungsi dari jaminan yang disertakan dalam pembiayaan *muḍārabah* KJKS BMT Surya Madani Boyolali, serta untuk mendapatkan informasi tentang pandangan hukum islam terhadap fungsi jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Secara teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut jaminan pembiayaan *mudārabah*. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi perbankan syariah.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan syariah dan dapat mengetahui bagaimana menurut pandangan hukum islam mengenai jaminan dalam pembiayaan *mudārabah* khususnya pada KJKS BMT Surya Madani Boyolali.

c. Bagi masyarakat luas

Dapat menjadikan bahan rujukan ketika hendak melakukan perjanjian kerja-sama berupa *mudārabah* dan diminta untuk menyertakan jaminan oleh bank/ lembaga keuangan syariah, masyarakat telah mengerti maksud dari penyertaan jaminan.